



KABUPATEN BENGKULU TENGAH

SUMBER BERITA

RABU, 11 SEPTEMBER 2019

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERISAAN PERHATIAN KHUSUS

Dana Desa Bisa Jadi Petaka

**Empat Kades
Dipenjara**

BENTENG, BE - Peringatan keras bagi Kepala Desa (Kades) beserta perangkat desa agar berhati-hati menggunakan dana desa (DD) bantuan dari pemerintah pusat. Jika tak waspada dalam menggunakannya, DD bisa menjadi petaka.

Beberapa kepala desa (Kades) di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) akhirnya mendekam di balik jeruji besi lantaran menyelewengkan DD senilai ratusan juta tersebut.

Diantaranya, mantan Kades Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang, mantan Kades Gajah Mati Kecamatan Semidang Lagan, mantan Kades Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi dan Kades Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Benteng, Drs Tomi Marisi MSi melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), Edi Susila SSTP MSi menegaskan, hukuman penjara

merupakan salah satu sanksi bagi para Kades yang sengaja melakukan penyimpangan DD.

"Dari beberapa kasus DD yang berujung pidana, oknum kades memang nekat membuat laporan fiktif penggunaan DD," ungkap Edi.

Modusnya, beber Edi, Kades sengaja menyampaikan laporan yang tidak sesuai fakta. Dari hasil penelusuran, belakangan diketahui bahwa pengerjaan pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana tidak selesai 100 persen.

Tak hanya itu, ada pula yang membuat laporan tentang penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Padahal penyertaan modal tersebut tak pernah dilakukan.

"Pembangunan tak selesai tapi dianggap selesai. Hal itu merupakan kegiatan fiktif dan sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi," kata Edi.

Mengingat sudah banyak Kades yang ditahan, Edi mengimbau kepada seluruh pemerintahan desa agar lebih

berhati-hati.

Edi mengingatkan agar realisasi DD harus sesuai dengan RAB dan aturan yang berlaku. Jika memang merasa ragu, silakan berkoordinasi dengan tim pendamping desa dan DPMD Benteng.

"Jangan menggunakan DD sesuka hati. Pembangunan harus sesuai dengan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes)," imbau Edi.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Daerah Benteng, Hj Yenda Syufriani SH MSi mengatakan, pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintahan Desa.

"Inspektorat juga turun ke desa-desa untuk melakukan pengawasan. Namun, pemeriksaan masih sebatas kelengkapan administrasi. Sebab, Inspektorat belum memiliki tenaga teknis yang mampu menghitung nilai kerugian negara suatu proyek," papar Yenda.

Sejauh ini, beber Yenda, laporan dari LSM serta pengaduan masyarakat terkait indikasi penyimpangan DD

memang banyak diterima oleh Inspektorat.

Berbekal informasi itulah, Inspektorat melakukan penelusuran dan mengecek kebenarannya.

"Jika memang nantinya ditemukan kerugian, kami masih bersikap persuasif dan berharap agar uang kerugian dikembalikan. Jika tak ada etikat baik, barulah kasus bergulir ke ranah hukum untuk diproses sesuai aturan," tegas Yenda.

Data terhimpun BE, DD tahun 2019 dikucurkan ke 142 desa di Kabupaten Benteng sebesar Rp 111.163.857.000.

Dari semua desa, hanya tinggal 2 desa yang belum mencairkan DD. Baik DD tahap I maupun tahap II, yaitu Desa Tamiyang Kecamatan Pagar Jati dan Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi.

Terhusus di Desa Tamiyang, laporan DD tahun 2018 juga belum tutup buku dan dalam waktu dekat akan diaudit Inspektorat. Sedangkan, DD di Desa Dusun Baru II tersendat akibat kades definitif ditahan beberapa waktu lalu. (135)